

## LAPORAN ARUS KAS

***Paragraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf kebijakan akuntansi, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Daerah.***

### I. PENDAHULUAN

#### I.1 Tujuan

Tujuan Kebijakan Akuntansi laporan arus kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran selama satu periode akuntansi.

Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

#### I.2 Ruang Lingkup

***Pemerintah Daerah menyusun laporan arus kas sesuai dengan kebijakan akuntansi ini dan menyajikan laporan tersebut sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok untuk setiap periode penyajian laporan keuangan.***

***Kebijakan Akuntansi ini berlaku untuk penyusunan laporan arus kas Pemerintah Daerah, satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut Kebijakan Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintahan, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan daerah yang diatur tersendiri dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.***

#### I.3 Manfaat Informasi Arus Kas

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.

Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas dana suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

#### I.4 Definisi

*Berikut istilah serta pengertian yang digunakan kebijakan akuntansi ;*

- 1. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.*
- 2. Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan uang yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.*
- 3. Apropriasi adalah anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada bupati untuk melakukan pengeluaran - pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.*
- 4. Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.*
- 5. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah selama satu periode akuntansi.*
- 6. Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya.*
- 7. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran.*
- 8. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan Pemerintah Daerah.*
- 9. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.*
- 10. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.*
- 11. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.*
- 12. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari*

*satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.*

- 13. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.**
- 14. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.**
- 15. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.**
- 16. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.**
- 17. Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.**
- 18. Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.**
- 19. Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.**
- 20. Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.**
- 21. Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.**
- 22. Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Rekening Kas Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.**
- 23. Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.**
- 24. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.**
- 25. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.**
- 26. Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan entitas pelaporan yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.**
- 27. Perusahaan negara / daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah pusat / daerah.**
- 28. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.**

- 29. Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.**
- 30. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari suatu entitas pelaporan lain termasuk penerimaan dari dana perimbangan dan dana bagi hasil.**
- 31. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan lainnya termasuk pengeluaran untuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.**

## **I.5 Kas dan Setara Kas.**

Setara kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

## **II. ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS**

***Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari beberapa entitas akuntansi yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang diantaranya:***

***(a) Pemerintah daerah; dan***

***(b) Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib membuat laporan arus kas.***

***Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan.***

Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

## **III. PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS**

***Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.***

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah daerah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa

aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Contoh format laporan arus kas disajikan dalam Lampiran IV.A, dan IV.B kebijakan akuntansi ini. Lampiran hanya merupakan ilustrasi untuk membantu pemahaman dan bukan bagian dari kebijakan akuntansi.

### III.1 Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi Pemerintah Daerah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

- (a) Penerimaan Pajak Daerah;
- (b) Penerimaan Retribusi Daerah;
- (c) Penerimaan Hibah;
- (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan daerah dan Investasi Lainnya, dan
- (e) Transfer masuk dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi digunakan untuk pengeluaran :

- (a) Belanja Pegawai;
- (b) Belanja Barang;
- (c) Bunga;
- (d) Subsidi;
- (e) Hibah;
- (f) Bantuan Sosial;
- (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
- (h) Transfer keluar.

***Jika entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.***

***Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.***

### III.2 Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap;
- (b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :

- (a) Perolehan Aset Tetap;
- (b) Perolehan Aset Lainnya.

### **III.3 Aktivitas Pembiayaan**

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (a) Penerimaan Pinjaman;
- (b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
- (c) Penerimaan dari Divestasi;
- (d) Penerimaan Kembali Pinjaman;
- (e) Pencairan Dana Cadangan;

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:

- (a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;
- (b) Pembayaran Pokok Pinjaman;
- (c) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
- (d) Pembentukan Dana Cadangan.

### **III.4 Aktivitas Nonanggaran**

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

## **IV. PELAPORAN ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI, INVESTASI ASET NONKEUANGAN, PEMBIAYAAN, DAN NONANGGARAN**

***Entitas pelaporan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran kecuali yang tersebut dalam bab V yang tertera dibawah ini.***

***Entitas pelaporan menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara Metode Langsung, dimana metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.***

Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

- (a) Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang;
- (b) Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

- (c) Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

## **V. PELAPORAN ARUS KAS ATAS DASAR ARUS KAS BERSIH**

*Arus kas yang timbul dari aktivitas operasi dapat dilaporkan atas dasar arus kas bersih dalam hal:*

- (a) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan penerima manfaat (beneficiaries) arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pihak lain daripada aktivitas pemerintah daerah. Salah satu contohnya adalah hasil kerjasama operasional.*
- (b) Penerimaan dan pengeluaran kas untuk transaksi-transaksi yang perputarannya cepat, volume transaksi banyak, dan jangka waktunya singkat.*

## **VI. ARUS KAS MATA UANG ASING**

*Arus kas yang timbul dari transaksi mata uang asing harus dibukukan dengan menggunakan mata uang rupiah dengan menjabarkan mata uang asing tersebut ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.*

*Arus kas yang timbul dari aktivitas entitas pelaporan di luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs pada tanggal transaksi.*

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan akibat perubahan kurs mata uang asing tidak akan mempengaruhi arus kas.

## **VII. BUNGA DAN BAGIAN LABA**

*Arus kas dari transaksi penerimaan pendapatan bunga dan pengeluaran belanja untuk pembayaran bunga pinjaman serta penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah harus diungkapkan secara terpisah. Setiap akun yang terkait dengan transaksi tersebut harus diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi secara konsisten dari tahun ke tahun.*

Jumlah penerimaan pendapatan bunga yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari pendapatan bunga pada periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah pengeluaran belanja pembayaran bunga utang yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah pengeluaran kas untuk pembayaran bunga dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

Jumlah penerimaan pendapatan dari bagian laba perusahaan daerah yang dilaporkan dalam arus kas aktivitas operasi adalah jumlah kas yang benar-benar diterima dari bagian laba perusahaan daerah dalam periode akuntansi yang bersangkutan.

## VIII. INVESTASI DALAM PERUSAHAAN NEGARA / DAERAH DAN KEMITRAAN

Pencatatan investasi pada perusahaan negara/daerah dan kemitraan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu metode ekuitas dan metode biaya.

***Investasi Pemerintah Daerah dalam perusahaan daerah dan kemitraan dicatat dengan menggunakan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehannya.***

***Entitas melaporkan pengeluaran investasi jangka panjang dalam perusahaan daerah dan kemitraan dalam arus kas aktivitas pembiayaan.***

## IX. PEROLEHAN DAN PELEPASAN PERUSAHAAN DAERAH DAN UNIT OPERASI LAINNYA

***Arus kas yang berasal dari perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasional lainnya harus disajikan secara terpisah dalam aktivitas pembiayaan.***

***Entitas mengungkapkan seluruh perolehan dan pelepasan perusahaan daerah dan unit operasi lainnya selama satu periode. Hal-hal yang diungkapkan adalah:***

- (a) Jumlah harga pembelian atau pelepasan;***
- (b) Harga pembelian atau pelepasan yang dibayar dengan kas dan setara kas;***
- (c) Jumlah kas dan setara kas pada perusahaan negara/daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas; dan***
- (d) Jumlah aset dan utang selain kas dan setara kas yang diakui oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepas.***

Penyajian terpisah arus kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya sebagai suatu perkiraan tersendiri akan membantu untuk membedakan arus kas tersebut dari arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Arus kas masuk dari pelepasan tersebut tidak dikurangkan dengan perolehan investasi lainnya.

***Aset dan utang selain kas dan setara kas dari perusahaan daerah dan unit operasi lainnya yang diperoleh atau dilepaskan perlu diungkapkan hanya jika transaksi tersebut telah diakui sebelumnya sebagai aset atau utang oleh perusahaan daerah dan unit operasi lainnya.***

## X. TRANSAKSI BUKAN KAS

***Transaksi investasi dan pembiayaan yang tidak mengakibatkan penerimaan atau pengeluaran kas dan setara kas harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.***

Pengecualian transaksi bukan kas dari Laporan Arus Kas konsisten dengan tujuan laporan arus kas karena transaksi bukan kas tersebut tidak mempengaruhi kas periode yang bersangkutan. Contoh transaksi bukan kas yang tidak



mempengaruhi laporan arus kas ialah perolehan aset melalui pertukaran atau hibah.

#### **XI. KOMPONEN KAS DAN SETARA KAS**

*Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca.*

#### **XII. PENGUNGKAPAN LAINNYA**

*Entitas pelaporan mengungkapkan jumlah saldo kas dan setara kas yang signifikan yang tidak boleh digunakan oleh entitas. Hal ini dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.*

Informasi tambahan yang terkait dengan arus kas berguna bagi pengguna laporan dalam memahami posisi keuangan dan likuiditas suatu entitas pelaporan.

Jika apropriasi atau otorisasi kredit anggaran disusun dengan basis kas, laporan arus kas dapat membantu pengguna dalam memahami hubungan antar aktivitas pelaporan atau program dan informasi penganggaran Pemerintah Daerah.

#### **XIII. TANGGAL EFEKTIF**

*Kebijakan Akuntansi ini berlaku efektif secara bertahap untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai Tahun Anggaran 2010.*

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 21 April 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN IV.A : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kutai Barat  
**LAPORAN ARUS KAS**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>		
3	Pajak Daerah	XXXX	XXXX
4	Retribusi Daerah	XXXX	XXXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXX	XXXX
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	XXXX	XXXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	XXXX	XXXX
9	Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXXX	XXXX
12	Hibah	XXXX	XXXX
13	Dana Darurat	XXXX	XXXX
14	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain	XXXX	XXXX
15	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	XXXX	XXXX
16	Bantuan Keuangan dari Provinsi	XXXX	XXXX
17	Lain-lain Pendapatan yang sah	XXXX	XXXX
18	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 17)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
19	<b>Arus Kas Keluar</b>		
20	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX
21	Belanja Barang dan Jasa	XXXX	XXXX
22	Belanja Bunga	XXXX	XXXX
23	Belanja Subsidi	XXXX	XXXX
24	Belanja Hibah	XXXX	XXXX
25	Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX
26	Belanja Bantuan Keuangan	XXXX	XXXX
27	Belanja Tidak Terduga	XXXX	XXXX
28	Belanja Bagi Hasil ke Desa	XXXX	XXXX
29	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (20 s/d 28)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
30	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 – 29)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
31	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>		
32	<b>Arus Kas Masuk</b>		
33	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXXX	XXXX
34	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX

35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
36	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXXX	XXXX
39	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (33 s/d 38)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
40	<b>Arus Kas Keluar</b>		
41	Belanja Tanah	XXXX	XXXX
42	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX
43	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
46	Belanja Aset Lainnya	XXXX	XXXX
47	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (41 s/d 46)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
48	<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (39 – 47)</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
49	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
50	<b>Arus Kas Masuk</b>		
51	Pencairan Dana Cadangan	XXXX	XXXX
52	Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXX	XXXX
53	Penerimaan Pinjaman Obligasi	XXXX	XXXX
54	Penerimaan Kembali Pinjaman	XXXX	XXXX
55	Penerimaan Piutang	XXXX	XXXX
56	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (51 s/d 55)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
57	<b>Arus Kas Keluar</b>		
58	Pembentukan Dana Cadangan	XXXX	XXXX
59	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX
60	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	XXXX	XXXX
61	Pemberian Pinjaman	XXXX	XXXX
62	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (58 s/d 61)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
63	<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (56 – 62)</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
64	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
65	<b>Arus Kas Masuk</b>		
66	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
67	Penerimaan UUDP	XXXX	XXXX
68	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (66 s/d 67)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
69	<b>Arus Kas Keluar</b>		
70	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
71	UUDP di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
72	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (70 s/d 71)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
73	<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (68 – 72)</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

74	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 20X1 (30+48+63+73)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
75	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	XXXX	XXXX
76	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	XXXX	XXXX
77	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
78	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXXX	XXXX
79	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 21 April 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**

LAMPIRAN IV.B : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 12 TAHUN 2010 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI.

Contoh Format Laporan Arus Kas Bendahara Umum Daerah  
**LAPORAN ARUS KAS**

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN  
31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	20X1	20X0
1	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>		
2	<b>Arus Kas Masuk</b>		
3	Pajak Daerah	XXXX	XXXX
4	Retribusi Daerah	XXXX	XXXX
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXX	XXXX
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	XXXX	XXXX
7	Dana Bagi Hasil Pajak	XXXX	XXXX
8	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	XXXX	XXXX
9	Dana Alokasi Umum	XXXX	XXXX
10	Dana Alokasi Khusus	XXXX	XXXX
11	Dana Otonomi Khusus	XXXX	XXXX
12	Hibah	XXXX	XXXX
13	Dana Darurat	XXXX	XXXX
14	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lain	XXXX	XXXX
15	Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	XXXX	XXXX
16	Bantuan Keuangan dari Provinsi	XXXX	XXXX
17	Lain-lain Pendapatan yang sah	XXXX	XXXX
18	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (3 s/d 17)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
19	<b>Arus Kas Keluar</b>		
20	Belanja Pegawai	XXXX	XXXX
21	Belanja Barang dan Jasa	XXXX	XXXX
22	Belanja Bunga	XXXX	XXXX
23	Belanja Subsidi	XXXX	XXXX
24	Belanja Hibah	XXXX	XXXX
25	Belanja Bantuan Sosial	XXXX	XXXX
26	Belanja Bantuan Keuangan	XXXX	XXXX
27	Belanja Tidak Terduga	XXXX	XXXX
28	Belanja Bagi Hasil ke Desa	XXXX	XXXX
29	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (20 s/d 28)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
30	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18 – 29)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
31	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN</b>		
32	<b>Arus Kas Masuk</b>		
33	Pendapatan Penjualan atas Tanah	XXXX	XXXX
34	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX

35	Pendapatan Penjualan atas Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
36	Pendapatan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX
37	Pendapatan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
38	Pendapatan dari Penjualan Aset Lainnya	XXXX	XXXX
39	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (33 s/d 38)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
40	<b>Arus Kas Keluar</b>		
41	Belanja Tanah	XXXX	XXXX
42	Belanja Peralatan dan Mesin	XXXX	XXXX
43	Belanja Gedung dan Bangunan	XXXX	XXXX
44	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXXX	XXXX
45	Belanja Aset Tetap Lainnya	XXXX	XXXX
46	Belanja Aset Lainnya	XXXX	XXXX
47	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (41 s/d 46)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
48	<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan (39 – 47)</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
49	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN</b>		
50	<b>Arus Kas Masuk</b>		
51	Pencairan Dana Cadangan	XXXX	XXXX
52	Hasil Penjualan Aset/kekayaan Daerah yang Dipisahkan	XXXX	XXXX
53	Penerimaan Pinjaman Obligasi	XXXX	XXXX
54	Penerimaan Kembali Pinjaman	XXXX	XXXX
55	Penerimaan Piutang	XXXX	XXXX
56	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (51 s/d 55)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
57	<b>Arus Kas Keluar</b>		
58	Pembentukan Dana Cadangan	XXXX	XXXX
59	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	XXXX	XXXX
60	Pembayaran Pokok Utang Pinjaman dan Obligasi	XXXX	XXXX
61	Pemberian Pinjaman	XXXX	XXXX
62	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (58 s/d 61)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
63	<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (56 – 62)</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
64	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN</b>		
65	<b>Arus Kas Masuk</b>		
66	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
67	Penerimaan UUDP	XXXX	XXXX
68	<b>Jumlah Arus Kas Masuk (66 s/d 67)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
69	<b>Arus Kas Keluar</b>		
70	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	XXXX	XXXX
71	UUDP di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
72	<b>Jumlah Arus Kas Keluar (70 s/d 71)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
73	<b><i>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran (68 – 72)</i></b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

74	<b>Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 20X1 (30+48+63+73)</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>
75	Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah	XXXX	XXXX
76	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah	XXXX	XXXX
77	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	XXXX	XXXX
78	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	XXXX	XXXX
79	<b>Saldo Akhir Kas</b>	<b>XXXX</b>	<b>XXXX</b>

ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal, 21 April 2010.

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**ISMAIL THOMAS**